

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006.
- Arto, Mukti *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Arto, Mukti, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ed.1, 2005.
- Chulsum, Umi dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-1, Surabaya: Yushiko Press, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: PT. Syaamil, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

- Dimiyanti, Khudzaifah, J. Djihansjah, Alexander Lay, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Al Hikmah, 1994.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pradilan Agama*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis & Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibrahim al Bājuri, Syekh, *Albājuri Ala Ibnu Qāsim Al Ghazzi Juz Tsāni*, Surabaya: Dārul Ilmi, t.t
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.ke-6, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mustofa, Wildan Sayuthi, *Kode Etik Hakim*, edisi kedua Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

- Najih, Mokhammad dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.
- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Noor Irfan, dkk, *Pedoman Penulisan Tesis*, Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, 2016.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/194 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh alsunnah juz 2*, Kairo: Maktabah Dar al-Turaz, 1970.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 3 (Fqhus Sunnah)* terjemahan oleh Noor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islama di Dunia Islam*, Revisi 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Syahrani, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Banjarmasin: MGP, 1986.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-1, Bandung: Citra Umbara,tt.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, cet XX, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Yazid, Abu *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Referensi Karya Ilmiah dan Internet:

Bahri, Samsul NIM 21209008, “Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji PNS Terhadap Mantan Istri Yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0001/Pdt.G/2011/PA. Sal)”, *Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga*, 2014.

Butarbutar, E. Nurhaini, “Antitomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum”, *Yustisia*, vol.1 No. 1, Januari-April, 2012.

M. Hadjon, Philips, “tentang wewenang”, *YURIDIKA*, Nomor 5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997.

- M. Wantu, Fence, “Mewujudkan kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September, 2012.
- Miftakhur Rozaq, Arif NIM 092111020 “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 258/Pdt.G/2015/PA. Bla Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Sampai Masa Iddah”, Skripsi tidak diterbitkan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Walisongo, Semarang, 2016.
- Nilkhairi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Istri Pasca Perceraian Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Th 1983 Jo. PP No. 45 Th 1990, *Jurnal Qiyas* Vo. 2 Nomor 2 diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu: Oktober 2017.
- Purnanisa, Lc, Martina (14.0254.14.01), Analisis Putusan Terhadap Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt. G/2014/PA. Mn), Tesis tidak diterbitkan Pascasarjana, IAIN Antasari, 2016.
- Rojabi, Gunda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Untuk Istri Yang Dicerai dalam PP Nomor. 10 Tahun 1983” Tesis yang tidak diterbitkan Hukum Keluarga, Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015.
- Tobing, Letezia, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, <http://hukumonline.com.htm>

Wahyuni Herawati, Tri, Yunanto dan Herni Widanarti, *Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, 2017.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama* jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Penjelasan Undang-Undang Perkawinan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*.